

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi :**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah
- Lamintang dalam Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Leiden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional Peter Mahmud Marzuki 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Satocid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*. Jakarta, Sinar Grafika

Tranggono, R. I., & Latifah, F. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

W.J.S. Poerwadarminta. 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

#### Jurnal/Artikel :

Bustomi, A. (2018). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*. Vol. 16, No. 2,. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*

Desiana, A., & Thalib, M. C. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. *Jurnal Legalitas*, 12(2)

Febriyanti, H. P., Al Yasin, R., Nur Sabrina, R. S., & Istanti, N. D. (2023). *Analisis Sediaan Farmasi di Indonesia dalam Menunjang Sistem Kesehatan Nasional: A Systematic Review*. *Jurnal Anestesi: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, 1(2)

Haryanti, R., Suwantika, & Bratadiredja, (2023). *Efek toksik merkuri dalam krim pencerah wajah dari perspektif klinis dan pengawasan konsumen*. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 12(1)

Rahmawati, D., Krisdivayanti, M., Dewi, I. C., Saputri, A., Anggrelia, T. P., Nurhalita, H. M., ... & Seviah, A. D. (2024). *Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar: A Studi Literature*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(1).

Sangga Aritya, U., Ardi, M., & Putra, J. K. (2019). *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar*. *Jurnal Lex Suprema*, 1(II)

Suteki, & Pratama, W. D. (2020). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Ditinjau dari Pendekatan Sosiologis dan Yuridis*. *Jurnal Hukum IUS*, 8(2).

Suharsyah, H. (2019). *Relevansi Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUS*, 7(1)

Shofie, Y. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).

Setiawan, R. (2019). *Penggunaan Sumber Hukum Dalam Penelitian Juridis Normatif*: Analisis literatur hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).

Siregar, A. (2020). *Teknik penelitian juridis normatif dalam studi hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2).

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022, Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.